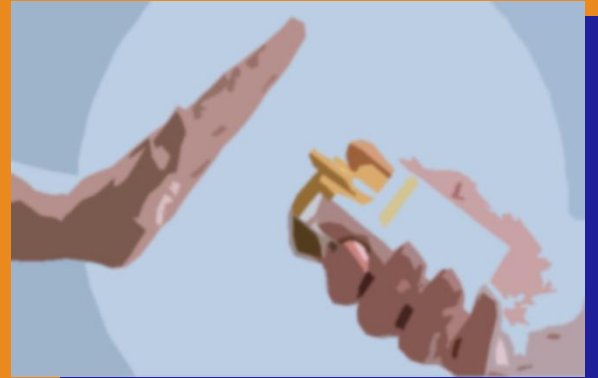


Upaya Terpadu Memberantas Rokok Ilegal

Pendahuluan

Peredaran rokok ilegal kini kian menjamur dan semakin mengkhawatirkan. Sejak 10 tahun terakhir, untuk pertama kalinya penetapan (kenaikan) tarif cukai hasil tembakau (CHT) dilakukan dalam dua tahun berturut-turut pada 2023 dan 2024. Tarif cukai hasil tembakau diatur pada PMK Nomor 192 tahun 2021 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 97 Tahun 2024. Alasan dibalik keputusan tersebut tak lain adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok. Namun bagai pisau bermata dua, kenaikan cukai yang signifikan menjadikan harga rokok legal semakin tidak terjangkau bagi sebagian konsumen. Sehingga mereka berusaha mencari alternatif lain yaitu dengan membeli rokok ilegal yang lebih murah dan terjangkau. Semakin tingginya permintaan rokok yang murah dan terjangkau, menjadikan peredaran rokok ilegal semakin tidak terkendali. *Tumbang satu tumbuh seribu*, sebuah kalimat yang tepat untuk menggambarkan maraknya peredaran rokok ilegal saat ini. Peredaran rokok ilegal diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 97,81 triliun (antaranews.com, 2025). Bukan hanya merugikan dalam lingkup pendapatan negara, namun juga rokok ilegal dapat lebih membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melewati pengawasan ketat dan uji laboratorium sebagaimana yang tertuang dalam PMK No 200/2008. *Masyarakat sakit karena rokok, pemerintah merugi karena rokok*. Beberapa penelitian menyimpulkan



Penyusun

- Revi Alvi Dzikri
- Purtanto
(Analisis Kebijakan Bagian
Perekonomian Setda Kota Tegal)

Ditujukan Kepada

- Kementerian Keuangan
- Pemerintah Daerah

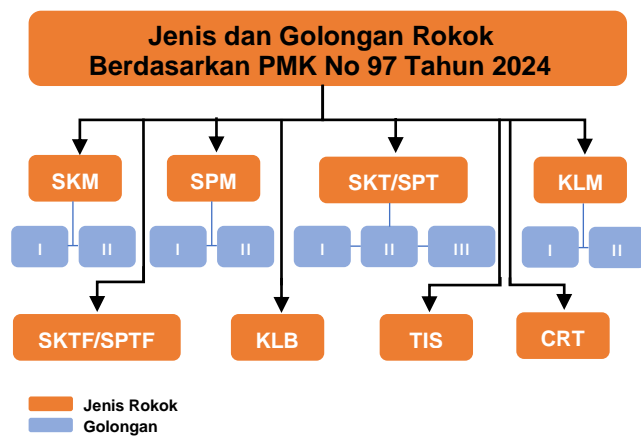
Ringkasan Eksekutif

Peredaran rokok ilegal semakin mengkhawatirkan. Data tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam peredaran rokok ilegal. Dampak negatif dari rokok ilegal selain merugikan pendapatan pemerintah, dia juga berdampak semakin buruk terhadap kesehatan masyarakat karena tidak adanya pengawasan. Guna menyelesaikan masalah tersebut terdapat solusi antara lain: penyederhanaan tarif CHT, aturan hulu-hilir, Digitalisasi database, sanksi ekonomi tegas, dan edukasi publik. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah menindaklanjuti alternatif yang dirasa lebih *urgent* saat ini dan memiliki resiko yang cukup minim.

dengan adanya penindakan tegas serta pengawasan yang ketat terhadap peredaran rokok ilegal, terbukti mampu mengurangi peredarannya dan meningkatkan pendapatan pemerintah (Muslikah dkk, 2024; PPKE FEB UB, 2019).

Permasalahan

Permasalahan rokok ilegal merupakan isu kompleks yang berdampak pada berbagai aspek seperti ekonomi dan juga kesehatan. Berdasarkan sudut pandang regulasi, struktur tarif pajak yang berlapis dianggap dapat menjadi penghalang bagi efektivitas usaha pemerintah dalam menekan konsumsi rokok serta adanya kemungkinan pergeseran menuju rokok ilegal (metrotvnews.com, 2023).



Angka peredaran rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan pada tiga tahun terakhir. Peredaran rokok ilegal semakin meningkat dari 28 persen di tahun 2022 menjadi 30 persen pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan lagi menjadi 46 persen di 2024. Direktur Eksekutif Indodata Research Center, Danis Saputra Wahidin, mengungkapkan bahwa hasil penelitian dan survei mengenai rokok ilegal menunjukkan pada 2024 konsumsi rokok ilegal mengalami peningkatan pesat dibandingkan tahun sebelumnya (bisnis.com, 2025).

Rokok ilegal pada umumnya diproduksi tanpa pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu dan bekas, sehingga tidak tercatat dalam sistem perpajakan negara. Rokok ilegal sering kali didistribusikan melalui jalur distribusi tersembunyi, seperti pedagang kecil, pasar tradisional, atau bahkan secara daring, sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen rokok legal. Dari sisi kesehatan dan keselamatan konsumen, rokok ilegal menjadi ancaman tersendiri. Karena diproduksi tanpa pengawasan standar mutu dan keamanan, rokok tersebut bisa mengandung zat-zat berbahaya melebihi ambang batas. Proses produksinya pun tidak jarang melibatkan bahan baku murah dan berbahaya, serta tidak memperhatikan kebersihan dan sanitasi. Konsumen yang tidak menyadari risiko ini akhirnya menjadi korban dari produk yang tidak layak edar. Penelitian Muslikah dkk (2024) menyatakan kenaikan tarif cukai

jika disertai dengan pengawasan terhadap rokok ilegal akan mengurangi konsumsi dan peredaran rokok ilegal, sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Hasil analisis PPKE FEB UB (2019) menunjukkan peningkatan penindakan terhadap rokok ilegal dapat menurunkan volume peredaran rokok ilegal secara signifikan.

Alternatif Solusi

01 Penyederhanaan Tarif HCT

Tarif cukai yang kompleks dan berlapis membuat perbedaan harga antar jenis rokok sangat besar. Hal ini membuka celah bagi produsen atau distributor nakal untuk mengelabui sistem dan menjual rokok dengan tarif lebih rendah dari yang semestinya. Tarif yang kompleks juga akan menyulitkan dalam melakukan pengawasan sehingga kecurangan menjadi tidak teratasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan struktur tarif CHT. Adanya penyederhanaan struktur tarif diharapkan akan mampu mengurangi disparitas harga antar golongan yang sangat tinggi, persaingan industri yang semakin sehat, menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi pengawasan, serta menyempitkan ruang manipulasi. Namun perlu diperhatikan beberapa kemungkinan jika dilakukan penyederhanaan tarif CHT seperti kemungkinan menurunnya pendapatan dari cukai rokok. Jika penyederhanaan mengarah pada kenaikan harga, maka kemungkinan masyarakat untuk beralih ke rokok ilegal semakin tinggi.

02 Pemberlakuan Aturan Hulu-Hilir

Pemberlakuan aturan ketat dari hulu ke hilir dalam produksi tembakau mengacu pada penguatan regulasi yang mengatur seluruh rantai produksi tembakau, mulai dari budidaya tanaman tembakau (hulu), proses pengolahan dan produksi (tengah), hingga distribusi dan penjualan produk tembakau (hilir). Aturan pada sektor hulu, dapat dilakukan dengan mengontrol jumlah lahan yang digunakan untuk budidaya tembakau; Mewajibkan petani terdaftar resmi dan melaporkan hasil panen untuk mencegah penyaluran bahan baku ke produsen ilegal; Memberlakukan sistem perizinan ketat untuk pabrik rokok dan pengolahan tembakau. Penindakan pabrik rokok ilegal harus tetap digempur agar menimbulkan efek jera. Terakhir, selain melakukan operasi pasar dan razia rokok ilegal, perlu dilakukan juga edukasi publik.

03 Digitalisasi Database Terpadu

Menerapkan sistem pelacakan digital terhadap pita cukai dan distribusi rokok, seperti *QR code* unik yang bisa diverifikasi masyarakat kemudian membangun *public database* yang terdiri dari semua pabrik rokok legal dan distributor resmi sehingga konsumen dan pedagang bisa mengecek legalitas pemasoknya secara langsung.

04 Sanksi Ekonomi Tegas untuk Konsumen dan Penjual

Saat ini, sanksi lebih difokuskan pada produsen besar, padahal rantai distribusi ilegal sering melibatkan toko kecil termasuk konsumen. Oleh karena itu dirasa perlu dilakukan tindakan tegas terhadap pengecer/pedagang dan konsumen yang terlibat dalam aktivitas rokok ilegal dengan denda tinggi, dan edukasi tentang risiko hukum.

05 Edukasi Publik Masif

Banyak konsumen tidak tahu bahwa mereka membeli produk ilegal, atau tidak memahami dampaknya. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya kampanye nasional untuk menyadarkan masyarakat soal dampak rokok ilegal terhadap penerimaan Negara, kualitas produk, dan dampak terhadap kesehatan.

Rekomendasi

Dalam jangka pendek, pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan yang bersifat mendesak namun minim risiko, seperti edukasi publik masif, sanksi ekonomi tegas, dan digitalisasi database terpadu. Edukasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu strategis seperti bahaya rokok dan pentingnya kepatuhan hukum. Sanksi ekonomi memberi efek jera dan memperkuat kepastian hukum, sementara digitalisasi database mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan cepat. Rencana penyederhanaan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), meski secara administratif mempermudah sistem fiskal, namun berisiko menurunkan penerimaan negara dan berdampak pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek sosial ekonomi yang merugikan. Sementara itu, penerapan regulasi industri dari hulu ke hilir menuntut kesiapan infrastruktur dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil serta petani tembakau. Transformasi kebijakan harus dirancang agar adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru, khususnya di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada sektor ini.

Daftar Pustaka

- Metrotvnews.com. 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCy6LD-struktur-tarif-cukai-kompleks-penyebab-rokok-murah-laris-manis>
- antaranews. 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4651769/indodata-peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp9781-triliun>
- Muslikah, Beby Hilda Agustin, & Puji Rahayu. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus : Kantor Bea Dan Cukai Kediri). *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 8(12), 71–80. <https://doi.org/10.8734/musytari.v8i12.6117>
- Junfirio, M., Amelia, A. S., Maelani, O. R., Ma'ruf, M., & Maulyda, F. C. (2024). Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9399–9406. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17076>
- Bisnis.com. 2025. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20250215/106/1839858/peredaran-rokok-ilegal-di-ri-marak-ini-penyebabnya>.